



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA CIMAHI  
**UNIT KERJA** : PIMPINAN TERTINGGI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NGATİYANA
2. Jabatan : WALIKOTA
3. NHK : 229646

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **2.190.400.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/196 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 386 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 110.000.000
3. Tanah Seluas 1012 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 507 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 152.100.000
6. Tanah Seluas 70 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 21.000.000
7. Tanah Seluas 439 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 131.700.000
8. Tanah Seluas 22 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 6.600.000
9. Tanah Seluas 62 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 18.600.000
10. Tanah Seluas 1168 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 350.400.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 483.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER SUV Tahun 2017, HASIL SENDIRI , LAINNYA , Rp. 400.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 39.137.713

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 2.712.537.713

**III. HUTANG**

Rp. 25.566.927

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 2.686.970.786

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.